

secara keseluruhan tanah yang dipergunakan untuk usaha perikanan atau pertambakan menempati urutan pertama yaitu 632,315 Ha. atau, sekitar 66,66prosen dari luas tanah secara keseluruhan. Atau kalau diperinci adalah sebagai berikut : Untuk desa Wedoro 29Ha atau sekitar 3,05 prosen dari luas tanah keseluruhan, atau sekitar 29,0 prosen dari luas tanah keseluruhan desa Wedoro. Untuk desa Dukuh Tunggal 310 Ha. Atau sekitar 32,68 prosen dari luas tanah keseluruhan, atau sekitar 88,44 prosen dari luas tanah Dukuh Tunggal. Untuk desa Bapuh Baru 109 Ha. Atau sekitar 11,49 prosen dari luas tanah keseluruhan atau sekitar 60,55prosen dari luas tanah desa Bapuh Baru. Untuk desa Tanggul Prigel 107,610 Ha, atau sekitar 11,34 prosen dari tanah keseluruhan, atau sekitar 73,17 prosen dari luas tanah desa Tanggul Prigel. Untuk desa Bangkok 76,205 Ha. atau sekitar 8,03 prosen dari luas tanah keseluruhan, atau sekitar 44,46 prosen dari luas tanah desa Bangkok. Untuk tanah yang disatukan dengan tata guna tanah lain-lain adalah tanah yang dipergunakan untuk sarana umum, masjid, langgar - langgar , lapangan, jalan-jalan desa, kuburan dan sejenisnya.

Selanjutnya komposisi menurut jumlah penduduk dari segi jenis kelamin, tingkat pendidikan pemeluk agama, dan mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

yang diambil sebagai sampel, dapat diketahui bahwa perjanjian bagi hasil tambak bandeng yang dilakukan antara pemilik dengan penggarap masih secara lesan, mereka saling percaya mempercayai antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Jadi 100 % perjanjian bagi hasil tambak bandeng di lokasi penelitian belum memenuhi ketentuan dalam pasal 1 peraturan Menteri perikanan darat atau laut nomer 1 /PERMIK/1964, yang menentukan setiap perjanjian bagi hasil perikanan baik terhadap ikandarat maupun ikan laut antara pemilik dengan penggarap tambak harus dibuat secara tertulis dihadapan Kepala Desa.

1. Bentuk perjanjian

Pasal 1 Peraturan Menteri Perikanan Darat/Laut Nomer 1/PERMIK/1964 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomer 16, tanggal 23 September 1964 tentang bagi hasil perikanan.

Maksud dan tujuan dari perjanjian bagi hasil perikanan yang harus dibuat di hadapan Kepala Desa dalam bentuk tertulis tersebut adalah untuk dijadikan alat bukti adanya perjanjian dan untuk memberikan suatu kepastian hukum. Sedangkan pengesahan Camat setempat adalah agar pengawasan secara khusus dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya oleh aparat pemerintah.

Pada kenyataannya dalam lokasi penelitian,

masyarakat tersebut merupakan adat atau kebiasaan dan telah dirasakan adil oleh mereka yang bersangkutan.

Dalam penelitian, beberapa responden yang memberikan keterangan pada penulis, bahwa pada perjanjian yang dibuat secara lisan itu atas kehendak adat yang berlaku, bahkan dalam mencapai kata sepakat untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tambak ini kedua belah pihak tidak pernah membicarakan tentang perjanjian tersebut.

Sikap saling percaya mempercayai dan berprinsip baik diantara sesamanya masih melekat di dalam pergaulan hidup masyarakat adat membawa pengaruh dalam cara mengadakan perjanjian bagi hasil tambak bandeng. Oleh karena itu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memerlukan pihak lain atau pihak ketiga yang berfungsi sebagai saksi. Hal ini diperkuat keterangan dari Bapak Asrori selaku kepala desa Tanggung Prigel, yang menyatakan sebagai berikut :

Perjanjian hasil bagi perikanan, yaitu tambak bandeng tidak pernah satupun yang dibuat secara tertulis. Kebiasaan yang terjadi di desa Tanggung Prigel ini ya demikian. Maksudnya perjanjian bagi hasil tambak bandeng hanya dibuat lisan dan hanya diketahui oleh mereka yang

bersangkutan. (Hasil wawancara dengan Bapak Asrori, tanggal 16 Nopember 1993).

Selanjutnya Bapak Camat Glagah, yaitu Drs. Gatot Soeroso menyatakan sebagai berikut :

Sepengetahuan Saya, masyarakat di sini di Kecamatan Glagah banyak terjadi perjanjian yang menyangkut tanah, baik tanah sawah atau pun tanah tambak. Umpamanya bagi hasil perikanan semuanya dilakukan secara lesan. Masyarakat lebih banyak menggunakan hukumnya sendiri. Sebelum adanya Undang-undang nomer 16 tanggal 23 September 1964 ini masyarakat masih praktek perjanjian yang menggunakan hukum adatnya masing-masing.

Dari data pada tabel tersebut dan diperkuat dengan kedua keterangan di atas, maka jelaslah bahwa perjanjian bagi hasil tambak bandeng di Kecamatan Glagah pada umumnya masih patuh pada ketentuan hukum adat setempat. Dengan adanya perjanjian antara pemilik tambak dan penggarap tambak tentang adanya perjanjian bagi hasil tambak bandeng. Maka perjanjian bagi hasil tersebut harus dipatuhi sesuai dengan perjanjiannya.

2. Jangka waktu perjanjian

Dari hasil penelitian di lapangan, jangka

waktu perjanjian bagi hasil tambak bandeng masyarakat Glagah adalah 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan. Hal ini dikarenakan dalam jangka waktu tersebut, tambak bandeng sudah dapat dipasarkan. Bila tambak yang dikelola tersebut diisi dengan bibit bandeng (nener), maka dalam waktu maksimal 5 (lima) bulan ikan bandeng sudah dapat diambil. Bila tambak yang dikelola tersebut diisi dengan ikan bandeng golndongan, maka dalam waktu antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan, ikan bandeng sudah dapat diambil.

Antara pemilik tambak dan penggarap dalam hal jangka waktu perjanjian bagi hasil tambak bandeng ini tidak pernah memperjanjikan batas waktu tertentu, tetapi jangka waktu tersebut ditentukan dengan melihat keadaan. Apabila ikan yang ada di dalam tambak tersebut sudah diambil dan dipasarkan maka hal itu dianggap selesai. Perjanjian bagi hasil tambak bandeng hanya berlaku untuk waktu satu musim dan berakhirnya adalah didasarkan pada suatu keadaan.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil tambak bandeng antara pemilik dan penggarap yang terjadi di Kecamatan Glagah dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel berikut :

Namun sebaliknya jika masih dalam jangka waktu satu musim, penggarap melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan kepentingan pemilik maka sewaktu-waktu penggarap dapat saja diancam untuk meninggalkan tambak yang digarapkannya. Dengan demikian perjanjian bagi hasil tersebut putus atau berakhir, tentunya setelah melalui peringatan atau teguran dari pemilik. Hal ini sesuai dengan pengakuan dari seorang penggarap, yang mengatakan :

Saya baru saja bekerja sebagai penggarap, tapi Saya tidak diperbolehkan mengerjakan tambak oleh pemilik tambak, karena memasukkan air melalui pintu air tanpa memberi saringan, sehingga banyak ikan bandeng yang keluar. Memang ini kesalahan Saya. Tapi ketika pergi Sayaupun masih diberi uang untuk rokok.

Selanjutnya untuk berakhirnya perjanjian bagi hasil tambak bandeng di Kecamatan Glagah menurut pengakuan 50 (lima puluh) orang kepada Saya, dapat terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut :

1. Selesainya panen bandeng dalam waktu tertentu dalam suatu musim dan pemilik tambak ingin menggarap tambaknya sendiri. Diakui oleh 12 orang.
2. Pemilik merasa tidak puas terhadap penggarap

bandeng. Biaya untuk mempersiapkan itu adalah seperti mengeduk atau menggali sampai kedalaman \pm 20 (dua puluh) cm, lebar \pm 150 (seratus lima puluh) cm. Galian ini menurut istilah adat setempat disebut "Kolong". Sedang bagian lain yang tidak dikeduk atau digali disebut "Teboh". Selain itu biaya-biaya untuk memperbaiki pematang dan membuat pintu-pintu air. Biaya ini dikeluarkan oleh pemilik tambak karena pemilik mengajak orang lain untuk bersama-sama penggarap bekerja dalam persiapan sebelum diisi ikan bandeng.

Biaya-biaya untuk merawat, memelihara atau memperbesar, contohnya adalah biaya-biaya pengobatan pemupukan dan pengairan atau penyempurnaan pematang. Kewajiban berikutnya bagi pemilik adalah membiayai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengambilan atau memanen ikan bandeng, berupa biaya pekerja, sewa alat alat memanen dan lain-lain biaya yang berkaitan dengan biaya memanen tersebut.

Kewajiban lain bagi pemilik tambak adalah kewajiban terhadap pemerintah yaitu, kewajiban untuk membayar pajak untuk pembiayaan tambaknya jika dengan irigasi. Dan kewajiban-kewajiban lain yang berkaitan sebagai pemilik tambak.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pemilik tambak/tanah, menanggung dan mengeluarkan

segala biaya mulai dari persiapan, pengobatan, pemupukan dan pembelian bibit ikan bandeng, mulai dari pemeliharaannya sampai ikan bandeng dapat dipasarkan, penggarap selaku pemelihara dan penjaga tidak mengeluarkan biaya sedikitpun.

Kewajiban dari penggarap tambak adalah menyediakan tenaga sepenuhnya untuk mengerjakan, memelihara, merawat dan menjaga tambak. Sesuai dengan apa kemauan pemilik tambak sehubungan dengan pengolahan tambak tersebut. Menurut pengakuan dua orang penggarap yang menyatakan bahwa penggarap harus siap mengerjakan apa yang diperintahkan oleh pemilik tambak. (Hasil wawancara dengan Bapak Aliman dan Bapak Ali, desa Bapuh Baru, tanggal 17-11-1993).

Berdasarkan keterangan yang didapat dalam hal memelihara, merawat dan menjaga tambak ini penggarap tambak harus menunggu tambak, sebagaimana mestinya bila perlu siang malam. Terutama bila melihat tanda-tanda bahaya yang mengancam keselamatan ikan di tambak, antara lain ada serangan penyakit ikan bandeng di daerah-daerah sekitarnya, ada tanda-tanda air besar atau akan banjir. Tetapi apabila keadaannya normal atau biasa saja dan tidak mengkhawatirkan maka mereka bisa pulang dan dapat menjenguk tambak lagi, pagi, siang atau sore.

Hal ini diperkuat dengan keterangan dari tokoh masyarakat sekaligus sebagai pemilik tambak, yaitu Bapak H. Fattah yang mengatakan :

Mereka (penggarap) biasa pulang atau tidak menginap di gubuk, bila tambak dilihatnya aman, tidak bahaya. Seperti ada wabah penyakit atau air banjir.

Perintah-perintah yang biasanya diberikan pemilik kepada penggarap antara lain, membuat atau menyempurnakan pematang, mengeduk/menggali sekeliling tambak atau membuat teboh, meratakan daratan, membersihkan pematang dari rumput dan segala tanaman yang mengganggu. Penggarap juga mengobati tambak, memperhatikan air, memasang senar dan membantu mengambil ikan untuk dipasarkan.

Pemilik tambak kadang-kadang mengontrol pekerjaan penggarap tambak dan mengerjakan secara bersama-sama dengan penggarap tapi hanya sebatas kemauan pemilik tambak.

Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat data pada tabel berikut yang menggambarkan keaktifan para pihak dalam melakukan pekerjaan dalam tambak.

kesibukan pekerjaan pemilik tambak sehari-hari

3. Demi keakraban, rasa kekeluargaan dan sikap saling hormat menghormati.
4. Pengaruh hukum adat terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak.

Hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat adalah merupakan penjelmaan dari suara hati masyarakat dalam kehidupan yang nyata, yang dipatuhi dan dipertahankan kelestariannya dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Pada dasarnya hukum adat dengan segala ketentuannya memang sudah melekat didalam jiwa masyarakat setempat. Hal ini dapat kita lihat di dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak bandeng yang merupakan salah satu contoh yang sepenuhnya masih didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat setempat. Kenyataan seperti ini dirasakan sudah cukup adil oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil tersebut.

Karena kuatnya pengaruh hukum adat seperti itu hadirnya suatu ketentuan-ketentuan baru, apalagi bila dianggap menyinggung rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan selama ini, akan tetapi

mengalami kesulitan dalam penerapannya. Ini bukan berarti bahwa ketentuan-ketentuan baru tersebut tidak dapat diterapkan, tetapi hal itu akan memakan waktu yang cukup lama untuk memasyarakatkannya. Dengan demikian kuatnya hukum adat itu menjadi hambatan bagi pelaksanaan undang-undang nomor 16 tanggal 23 September 1964. Masyarakat Glagah sampai sekarang belum melaksanakan bahkan belum mengenal keberadaan undang-undang nomor 16 tahun 1964 tersebut.

5. Tanggung jawab kedua belah pihak bila terjadi resiko.

Resiko adalah kewajiban untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian yang ada di luar kesalahan atau kekuasaan salah satu pihak.

Dalam perjanjian bagi hasil tambak bandeng ini penggarap tidak dibebani biaya atau ongkos pengusaha tambak. Penggarap cukup hanya menyediakan tenaganya dan bertanggung jawab terbatas pada tenaga yang diberikan itu, sedangkan pemilik tambak bertanggung jawab terhadap biaya, resiko atau kerugian yang timbul baik itu karena kejadian yang tak terduga, seperti adanya wabah penyakit atau adanya banjir juga resiko yang timbul sebagai akibat dari kesalahan yang dibuat oleh pemilik tambak, atau penggarap sendiri.

Kesalahan yang ditimbulkan oleh pemilik tambak, misalnya terlambat menyediakan pupuk atau obat-obatan. Sedangkan kesalahan yang mungkin ditimbulkan oleh penggarap, misalnya penggarap bekerja di tambak tidak sesuai dengan perintah pemilik atau kurang cermat mengontrol air dan sebagainya. Jadi pemilik tambak menanggung segala biaya perusahaan dan memikul segala macam resiko yang mungkin timbul, sedangkan penggarap hanya menyediakan tenaganya.

Selama ini menurut keterangan yang ada, tidak pernah terjadi sengketa yang menuntut ganti rugi dari kedua belah pihak bila terjadi resiko. Hal itu mereka saling menyadari bila terjadi resiko atau kerugian hanyalah semata-mata merupakan kehendak Allah s.w.t. Akan tetapi jika ternyata resiko atau kerugian itu benar-benar dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari pihak penggarap, kesalahan itu merupakan penilaian tersendiri bagi pemilik tambak dan resiko yang paling besar harus diterima oleh penggarap tambak adalah diputuskannya perjanjian bagi hasil tambak bandeng untuk waktu berikutnya.

Hal tersebut diatas sesuai dengan keterangan yang yang diberikan oleh seorang pemilik tambak yang bernama Bapak Muhammad Saiful, yang mengatakan :

Apabila dalam perjanjian bagi hasil ada resi-

Dari hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan perjanjian bagi hasil, khususnya tambak bandeng, pemilik harus siap sedini mungkin dalam memanen ikan bandeng. Hal itu diketahui dalam pelaksanaannya, pemilik tambak harus siap menyediakan alat-alat atau prasarana yang berkenaan atau berhubungan dengan ikan bandeng, berupa jaring, mesin diesel untuk membuang air dan menjaga jangan sampai ikan bandeng yang diambil tersebut keluar tambak. Ikan yang sudah dipanen siap dipasarkan di pelelangan ikan (terminal ikan), dan penggarap siap untuk menerima hasil dari ikan tersebut sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Adapun bagian yang diterima penggarap tambak dan pemilik tambak ada dua macam pembagian yaitu :

1. Untuk penggarap sebesar 10 % dari hasil bersih.
2. Untuk pemilik tambak sebesar 90 % dari hasil bersih.

Yang dimaksud dari hasil bersih adalah hasil yang diperoleh dari tambak keseluruhan setelah dikurangi dengan biaya bibit ikan, biaya persiapan, pemeliharaan dan pemupukan sampai bandeng dapat dipasarkan.

Hal itu sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Sulaiman, selaku Kepala Desa Bapuh Baru

